

**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DI KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana pada
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**BOGI NURMANTORO
F 1108504**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS EKONOMI

Jl.Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp (0271) 647481 Fax. (0271) 638143

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret:

Nama : Bogi Nurmantoro
NIM. : F. 1108504
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN SWADANA TRANSFER
Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo, 9 Maret 1988
Alamat : Menuran Rt.03/01 Jobayan
Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
Pembimbing : Drs. Guntur Riyanto, M.Si
Judul skripsi : "ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) DI KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya buat merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari, bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi:
 - a. Sebelum dinyatakan lulus, bersedia menyusun skripsi ulang dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan lulus, penjabutan gelar dan penarikan Ijazah kesarjanaannya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

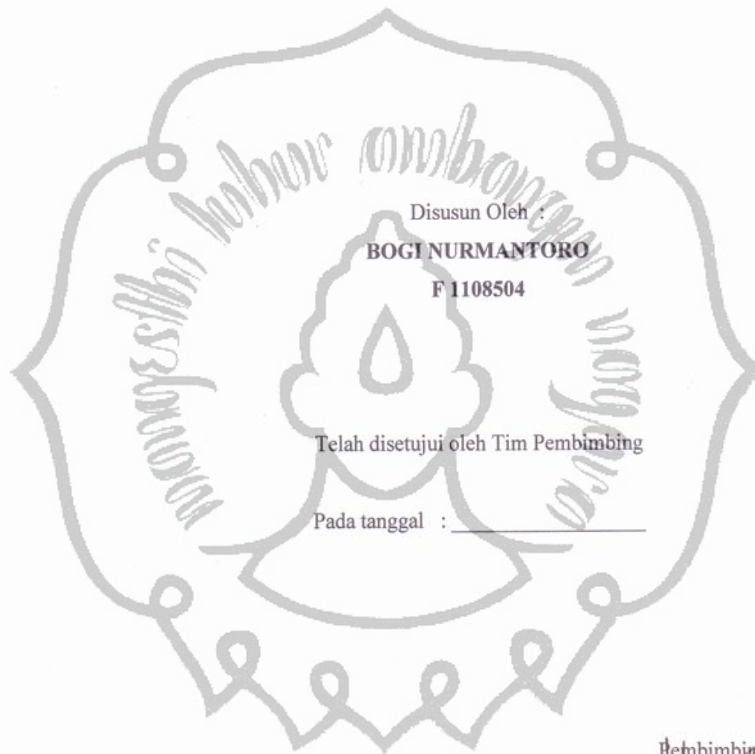
Surakarta , September 2011
Mahasiswa yang menyatakan



Bogi Nurmantoro
NIM. F.1108504

Halaman Persetujuan Pembimbing

**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) DI KECAMATAN
NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR**



Disusun Oleh :

BOGI NURMANTORO

F 1108504

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada tanggal : _____

Pembimbing

Dr. Guntur Riyanto, M.Si




HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DI KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

Disusun Oleh :
Bogi Nurmantoro
F1108504

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal : _____

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Drs. BRM. Bambang Irawan, Msi	
Pembimbing	Dr. Guntur Riyanto, Msi	
Tim Penguji	Drs. Joko Nugroho, Msi	

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kuucapkan terima kasih dan kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Allah SWT pemilik hidup dan matiku, mantapkan hatiku untuk menjalani takdirku serta kuatkanlah aku dalam Islam dan iman.

Kemudian karya ini saya hadiahkan kepada :

1. Ibu dan Ayah tercinta, atas segala doa dan kasih sayang.
2. Seseorang tercinta dan tersayang, atas segala semangat, kasih sayang, dan perhatian.
3. Adikku tercinta yang aku sayangi.
4. Semua sahabatku yang telah memberi berjuta kenangan.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, meskipun dengan kemampuan dan waktu yang terbatas akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR”**.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari segala bentuk bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Wisnu Untoro, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. Guntur Riyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, nasehat, bimbingan hingga tersusunnya Skripsi ini.
3. Drs. BRM. Bambang Irawan. Msi dan Drs. Joko Nugroho. Msi, selaku penguji yang telah memberikan banyak nasehat yang sangat berguna bagi saya pribadi.

4. Ibu, Ayah dan adikku tercinta, terima kasih atas dorongan, kasih sayang, pengorbanan, dan doa tiada henti yang membuat penulis selalu bangkit dalam mewujudkan impian dan cita-cita.
5. Dindutku, yang telah memberikan dukungan selama ini, makasih buat semuanya.
6. Sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa selama ini.
7. Tim UPK PNPM Ngargoyoso. Mas Haryanto, Etik, Mbak Indri, Mas Ponco, Mas Bowo, Mbak Happy, terima kasih atas dukungannya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga tersusunnya penulisan Skripsi ini.

Semoga semua pihak yang penulis sebutkan atau tidak, selalu mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun, penulis berusaha menyajikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2011

Penulis

Bogi Nurmantoro

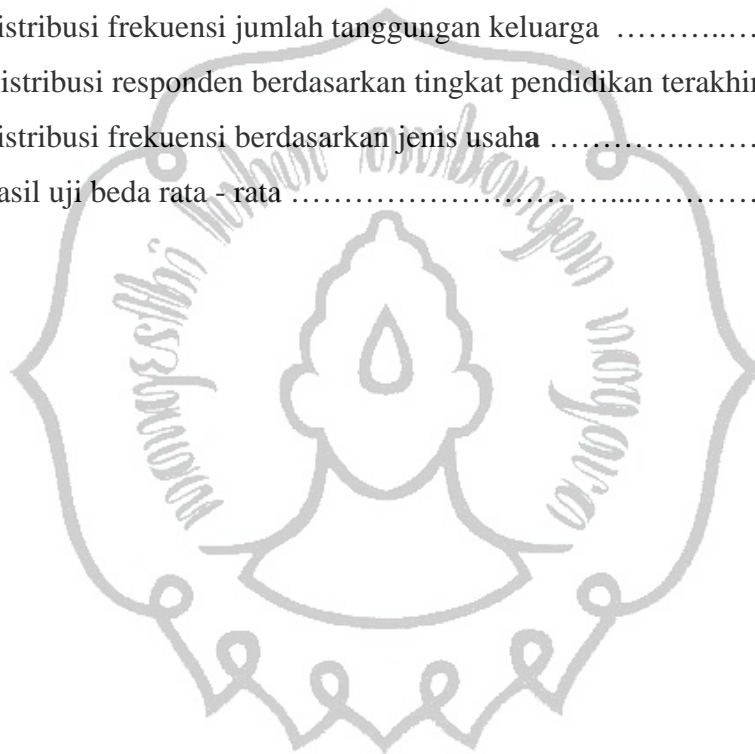
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan	14
1. Pembangunan Ekonomi.....	14
2. Model Pembangunan Ekonomi.....	15
3. Perencanaan Pembangunan	16
B. Kemiskinan	19
C. PNPM	25
1. Prinsip Pokok PNPM	26
2. Cakupan Wilayah PNPM	28
3. Cara Kerja PNPM	29
4. Penyaluran Dan Pencairan Dana	32
5. Hasil PNPM	34
D. Penelitian Terdahulu	37

E. Kerangka Pemikiran.....	40
F. Hipotesis	41
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Data dan Sumber Data	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Analisis Data	43
D. Metode Analisis	43
E. Asumsi Penelitian	44
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah	47
B. Analisis Deskriptif	58
C. Analisis Data	62
D. Pembahasan	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1	Kerangka Penelitian	41
4.1	Karanganyar Dalam Angka	50
4.2	PDRB Karanganyar	57
4.3	Distribusi frekuensi asal desa kelompok sempel	59
4.4	Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin	59
4.5	Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur	60
4.6	Distribusi frekuensi jumlah tanggungan keluarga	60
4.7	Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	61
4.8	Distribusi frekuensi berdasarkan jenis usaha	61
4.9	Hasil uji beda rata - rata	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Surat Ijin Penelitian
3. KUESIONER
4. Data Penelitian
5. T-Test



ABSTRAKSI

BOGI

ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dampak Program PNPM terhadap anggota kelompok SPP, dan (2) untuk mengetahui pengaruh program PNPM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok SPP.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : (1) diduga program PNPM meningkatkan produktivitas anggota PNPM, (2) diduga program PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja, (3) diduga program PNPM meningkatkan penghasilan anggota kelompok SPP dan (4) diduga program PNPM dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok SPP. Populasi penelitian adalah 720 anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menerima PNPM di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Jumlah anggota kelompok SPP bervariasi 5-10 anggota. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp 500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00. Sampel penelitian sebesar 5 % dari populasi kelompok yaitu 16 kelompok, dengan masing - masing kelompok diambil 2-3 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 40 responden dengan teknik *random sampling*. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan uji beda rata - rata. Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa (1) terdapat peningkatan jumlah produktivitas yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 1 terbukti. (2) terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 2 terbukti, dan (3) terdapat peningkatan penghasilan perbulan yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 3 terbukti

Berdasarkan analisa data diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) anggota kelompok SPP. penerima dana PNPM di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluruhnya adalah perempuan dengan pendidikan yang masih rendah yaitu SLTP, (2) anggota kelompok SPP penerima dana PNPM di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, memanfaatkan dana PNPM untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan, (3) adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan anggota kelompok SPP di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebelum dengan setelah adanya PNPM.

Kata Kunci: PNPM, SPP, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi tidak berdaya karena terbatasnya kemampuan ekonomi sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit dikenali dan ditarik garis batas secara umum mengingat berbagai perbedaan yang melatarbelakangi. Kemiskinan harus ditanggulangi, banyak teori ekonomi yang tersedia di lembaga perguruan tinggi dan riset, namun tidak semua teori itu bisa dijalankan atau dilaksanakan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas pemerintah seperti menyediakan lapangan pekerjaan, memberantas korupsi, menerapkan sistem ekonomi, menyediakan infrastruktur dan mengundang investor domestik maupun asing.

Perubahan cara berfikir dan cara bertindak pada ukuran kecil orang per orang atau keluarga bisa berkembang dan punya dampak pada penerapan kebijakan umum yang dilakukan pemerintah. Ukuran kemiskinan bukan garis kemiskinan atau upah minimum tetapi dari penghasilan yang diperoleh cukup untuk biaya makan, kebutuhan listrik, air, transportasi, biaya sekolah, menabung dan membayar asuransi kesehatan, kemandirian dan jiwa dalam pengertian yang sederhana. Kalau kebutuhan sederhana tersebut belum mampu untuk membiayainya kita masih dalam situasi yang bisa mengancam kemiskinan. Krisis moneter yang terjadi sekitar Tahun 1997 telah menambah jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga pada Tahun 1998 Pemerintah mengucurkan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program ini masih berada dalam program jaring pengaman social (social safety net) dengan menitik beratkan pada upaya pemberdayaan komunitas (communiy empowerment) yang relatif berbeda dengan program JPS lainnya.

Pada dasarnya pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan yang lebih baik. Pembangunan tanpa mengikutsertakan faktor sosial kemasyarakatan akan menjadi faktor penarik dan pendorong. Kedua faktor tersebut akan menghambat keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan akan terganggu akibat faktor kemasyarakatan yang kurang serius mendapatkan perhatian. Akibat yang ditimbulkan akan terjadi gejolak sosial dan berbagai gerakan atau perubahan struktur masyarakat serta mobilitas sosial yang bergerak berubah mengikuti perubahan jaman.

Dalam teori perubahan sosial, bahwa perubahan itu mengarah kepada kemunduran dan kemajuan. Apapun arah perubahan sosial tersebut, fungsi waktu sangat menentukan apakah perubahan sosial tersebut mengarah pada perubahan yang sangat cepat bahkan sangat lambat. Disamping itu perubahan dapat juga mencakup aspek yang sangat luas maupun aspek yang sangat sempit dan perubahan tergantung dari cakupan ruang lingkup serta ruang perubahannya.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu bentuk persoalan masyarakat yang disebabkan akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan akan cara kerja yang profesional serta berbagai tekanan yang ditimbulkan. Disamping itu faktor keterbatasan terhadap akses informasi, akses perbankan, akses mendapatkan sumber-sumber pendapatan juga menjadi penyebab utama kemiskinan.

Data kemiskinan Kecamatan Ngargoyoso status Desember 2009 yang bersumber dari BPS Kec.Ngargoyoso, menurut klasifikasi kemiskinan berjumlah 1.055 KK dengan jumlah anggota jiwa 4.398 yang berarti KK Miskin Kecamatan Ngargoyoso 12,50 % dari jumlah 8.440 KK dengan jumlah penduduk 35.182 jiwa.

Tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan dan Mandiri di Wilayah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri pedesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan system pembangunan parsipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri perdesaan, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan startegi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian yang berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran melalui Program Pengembangan Kecamatan.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kondisi di suatu masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat menikmati pendidikan yang memadai. Ketidak mampuan dan ketidak tahuan masyarakat mengakibatkan produktifitas mereka rendah. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak menguasai teknologi yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Terpaksa masyarakat menggunakan tehnik konvensional yang sudah mereka pelajari turun temurun dengan hasil yang minimal. Terlihat secara sepintas masyarakat sudah puas dengan hasil mereka tetapi kenyataan yang sebenarnya masyarakat tidak sadar bahwa mereka masih dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari saat ini. Lingkaran masalah yang dihadapi masyarakat tidak dapat diputuskan rantainya pada salah satu sisi saja. Akan tetapi seluruh masyarakat perlu diatasi, untuk itu masyarakat sendirilah

yang perlu dijadikan sebagai pemain utama dalam mengatasi masalah-masalah mereka.

Secara garis besar pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan masyarakat dengan cara membangun manusia mengembangkan potensi masyarakat dan mengubah sikap hidup, pemberdayaan masyarakat dapat juga melalui pengorganisasian masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhannya, memprioritaskan dan mencari pemecahannya, pengembangan dari masyarakat melihat potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi kemampuan untuk bertani, beternak, melakukan wirausaha atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri. Kemampuan dan ketrampilan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Dalam pengorganisasian masyarakat kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksana, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri diantaranya

penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan membangun dinamika.

Ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan. Di sini akan disorot ketimpangan sektoral berdasarkan pertumbuhan. Ketimpangan pertumbuhan antarsektor bukan saja terjadi pada masa lalu tetapi juga memang direncanakan untuk masa-masa yang akan datang. Ketimpangan pertumbuhan dan penumbuhan antarsektor khususnya sektor pertanian dan pengolahan industri harus dipahami secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral bukanlah eksekusi pembangunan namun memang disengaja atau direncanakan. Hal ini terkait dengan cita-cita nasional atau setidaknya selaras dengan kehendak para perencana pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Industrialisasi telah dipilih sebagai jalur pembangunan yang ditempuh untuk menuju kemajuan. Oleh sebab itu sektor industri pengolahan harus tumbuh lebih cepat daripada sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun skor kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Kelayakan rumah orang-orang kota lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup orang-orang kota jauh lebih baik

daripada orang-orang desa. Semua ini cukup membuktikan kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Pengurangan kemiskinan memang perlu, kemiskinan sampai kadar memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai masyarakat kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur (tidak miskin) tetapi juga mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan. Bersama yang relatif setara, tanpa perbedaan mencolok satu sama lain.

Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriyah setiap orang. Keadaan semacam itu akan tetapi barulah sekadar memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal di samping sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat. Dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini, manusia membutuhkan kebersamaan dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan ketimpangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan.

Secara umum PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan pembangunan. Secara khusus tujuan PNPM Mandiri meliputi:

- (1) meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan,
- (2) dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian,
- (3) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal,
- (4) mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,
- (5) menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat,
- (6) melembagakan pengelolaan dana bergulir, mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD),
- (7) mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sehingga nilai-nilai dasar ini diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip ini meliputi :(1) pembangunan manusia,(2) otonomi masyarakat, (4) desentralisasi, (5) berorientasi pada masyarakat miskin,(6) partisipasi masyarakat,(7) kesetaraan gender,(8) demokratis,(9) transparansi dan akuntabel,(10) prioritas dan (11) berkelanjutan.

Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maka dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Nargoyoso yang berdiri mulai Juli 2009. program dari pemerintah pusat tersebut telah berjalan

kurang lebih sepuluh tahun sedangkan di wilayah kabupaten Karanganyar pada umumnya dan Kecamatan Ngargoyoso khususnya program ini berjalan dua tahun. Perubahan yang terjadi ternyata tidak hanya di level UPK akan tetapi dari tingkat pusat juga mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah yang dulu program ini bernama PPK mulai April 2007 sebutan PPK sudah diganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bagian dari piranti pemberdayaan serta berfungsi sebagai lembaga sosial dan ekonomi, sehingga UPK mempunyai peran mengawal jalannya proses PNPM-MPd. UPK juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi yaitu mengelola dana bergulir yang berasal dari program PPK, PNPM-PPK dan PNPM-MPd dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Sedangkan sebagian dari hasil usaha yang dilakukan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Walaupun program mengalami perubahan nama akan tetapi keberadaan UPK mutlak diperlukan. Keberadaan serta keberlanjutan kegiatan UPK akan ditentukan beberapa faktor diantaranya keberadan kelompok-kelompok pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang kuat. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh UPK Kec.Ngargoyoso untuk memperkuat keberadaan kelompok-kelompok tersebut adalah mulai dari tahapan sosialisasi, proses verifikasi, pembinaan peningkatan kapasitas kelompok dan mengidentifikasi masalah-

masalah sehingga dapat dicarikan solusi untuk memecahkan masalah (problem solving) secara bersama-sama.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap jumlah produksi pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).
2. Bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).
3. Bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap keuntungan pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap hasil produksi pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).
2. Untuk Mengetahui bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap keuntungan pada usaha penerima modal program simpan pinjam perempuan (SPP).

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, dan atau kelompok perempuan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara selama kurun waktu yang panjang selalu meningkat dengan catatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2000:57).

Definisi lain tentang pembangunan ekonomi dikemukakan oleh Arsyad (1999:6) yang mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi tersebut, pembangunan ekonomi mengandung beberapa konsep dasar, yaitu:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang

d. Perbaiki sosial dan budaya sistem kelembagaan. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu perbaikan organisasi (intitusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal).

2. Model Pembangunan Ekonomi

Menurut Suryana (2000:68-72) ada empat teori atau model pembangunan ekonomi yang bisa diterapkan, yaitu:

- a. Model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Tujuan pokok strategi ini adalah meningkatkan laju produksi (GDP). Kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan faktor utama dan merupakan parameter ekonomi dan sosial yang paling baik untuk tingkat hidup suatu masyarakat.
- b. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Sasaran yang dicapai adalah peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan produksi dengan cara redistribusi pendapatan melalui perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
- c. Model pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan. Tujuan strategi ini mengurangi kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP (*Gross National Product*) atau peningkatan pendapatan kelompok miskin. Strategi ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijaksanaan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas, reorientasi produksi melalui

proyek padat karya dan relokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dan konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan sektor informal di perkotaan.

d. Model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*The Basic Necessary Oriented*).

- 1) i. Tercapainya investasi yang tinggi
 - ii. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - iii. Penggunaan sumber daya alam dalam produksi.
- 2) Perubahan dalam pola redistribusi
 - i. Mobilitas penganggur
 - ii. Relokasi pelayanan jasa umum
 - iii. Land reform
- 3) Perubahan kelembagaan
 - i. Partisipasi massa
 - ii. Dukungan pemerintah

3. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan

(Conyen dan Hills dalam Arsyad, 1992:19) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Tujuan dari

perencanaan Pembangunan adalah mencapai peningkatan pendapatan nasional, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta pemusatan kekuatan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan (Jhingan dalam Arsyad, 1999:27).

b. Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga bagi pembangunan nasional, sebab pembangunan daerah merupakan komponen untuk membangun perekonomian nasional secara menyeluruh. Di samping itu pembangunan daerah dapat melestarikan kebudayaan setempat, menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat dan utamanya mencegah jurang kemakmuran akibat ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang dapat menimbulkan pengaruh merugikan (*backwash effects*) dan bukan pengaruh menguntungkan (*spread effects*) (Sukirno, 1976:10).

Daerah meliputi desa dan kota, sehingga penyusunan perencanaan daerah harus memperhatikan seluk beluk mengenai desa dan kota. Perencanaan kota merupakan usaha penataan kota yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan fisik, untuk mencapai kehidupan yang nyaman dan harmonis di antara unsur-unsurnya.

Perencanaan kota tidak hanya menuntut penataan ruang dan bangunan fisik saja tetapi juga merupakan penataan sistem sosial dan lingkungan hidup masyarakatnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kota adalah aspek ekonomi, sosial dan aspek fisik. Keberhasilan perencanaan tersebut juga tergantung pada pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah, perencana dan masyarakat (Bintoro dalam Sartono, 2002:34).

Pembangunan desa dalam pelaksanaannya dikenal dengan konsep pembangunan masyarakat desa (PMD). Tujuan dari pembangunan desa adalah membantu kesulitan-kesulitan yang melilit masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup serta membentuk kemandirian masyarakat desa.

Dari sudut modernisasi desa dapat dikemukakan lima tujuan pembangunan desa yaitu (Bintoro dalam Sartono, 2002:35).

- 1) Memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monotoni dari kehidupan masyarakat desa, sehingga warga desa tidak merasa jemu dengan lingkungannya.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa, sehingga dapat menahan arus urbanisasi.
- 3) Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan secara merata sehingga dapat mengurangi arus para pelajar ke kota dan tenaga

terdidik akan tetap tinggal di desa membimbing warga desa lain yang belum maju.

4) Modernisasi di bidang pengangkutan akan secara secara berangsur menghilangkan sifat isolasi desa.

5) Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi pedesaan dan dalam proses pengembangannya warga desa dapat diikutsertakan.

B. Kemiskinan

1. Kemiskinan sebagai hambatan pembangunan

Kuncoro (2000:103) mendefinisikan kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu.

Beberapa ahli lain mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan yang serba kekurangan dalam mendapatkan sumber pendapatan untuk hidup minimum dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (Tumanggor, Suparlan dalam Misbach, 2004:4). Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu hambatan dalam pembangunan, karena kemiskinan merupakan masalah keterbelakangan ekonomi suatu negara (M.L Jhingan, 1996:42). Kemiskinan dapat mengakibatkan masyarakat di suatu negara terutama di negara sedang berkembang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memasuki sector riil, baik sebagai pekerja maupun

sebagai pelaku bisnis lainnya. Karena itu sangat diperlukan suatu upaya penanggulangan agar seluruh masyarakat dapat memasuki pasar kerja.

2. Ukuran Kemiskinan

Secara umum ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua (Arsyad, 1992;190-192), yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan pada dasarnya bisa diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak memenuhi kebutuhan minimum maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau yang sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak

miskin. Ada ahli yang berpendapat bahwa meskipun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan pengembangan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif lebih bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

c. Penyebab Kemiskinan

(Sharp dalam Mudrajad, 1997:107) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- 1) Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM).
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

d. Cara Mengatasi Kemiskinan

Setelah mengetahui sebab-sebab kemiskinan, selanjutnya diuraikan model untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan yang begitu luas mengharuskan setiap upaya

penanggulangan kemiskinan dalam tatanan makro perlu dilakukan secara terpadu, yang meliputi berbagai program pembangunan terpadu baik sektoral maupun regional. Dalam hal ini yang diperlukan adalah penajaman program dan kegiatan sehingga hasilnya lebih optimal dan berdampak langsung terhadap kelompok sasaran.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dibagi atas kelompok (Edwina dalam Palupi, 2001:37).

- 1) Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran, tetapi memberikan dasar tercapainya upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan tidak terbatas pada penduduk miskin tetapi program-program tersebut cukup berperan dalam mengatasi kemiskinan.
- 2) Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktifitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
- 3) Kebijakan khusus, keseluruhan rencana dan kegiatannya tertuju pada kelompok masyarakat miskin dan diberi nama yang mencerminkan kegiatan tersebut. Program khusus ini

berupaya untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh tersedianya dana, daya dan sarana, intensitas dan kualitas berbagai kegiatan pelaksanaannya, kualitas hasil langsung dari kegiatan tersebut dan efek serta dampak yang diperoleh.

e. Garis Kemiskinan

1) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriteria kemiskinan BPS diperoleh dengan cara menghitung jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan sebanyak 2100 k kalori perkapita per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

2) Menurut Sayogyo tahun 1971

Batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun dikonversi dengan nilai tukar beras. Sayogyo dalam Suseno (1990:126-127) telah menghitung bahwa seseorang dikelompokkan ke dalam golongan:

- a) Miskin, apabila tingkat pendapatannya lebih kecil dari 320 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 480 kg untuk perkotaan.
- b) Miskin sekali, apabila tingkat pendapatannya lebih kecil dari

240 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 360 kg untuk perkotaan.

- c) Melarat, apabila seseorang mempunyai pengeluaran 180 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 270 kg nilai tukar beras untuk perkotaan.

Dalam ilmu-ilmu sosial pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolok ukur. Dengan adanya tolok ukur ini mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau yang berada dalam taraf kehidupan miskin dapat diketahui untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang perlu diperangi kemiskinannya.

M.P Todaro (2000: 200-206) mengemukakan dua anggapan dasar yang kiranya cukup relevan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas mengenai kemiskinan, yaitu :

- a) Kemiskinan identik dengan penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.
- b) Kaum wanita dan anak-anak merupakan kaum yang paling menderita, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas mereka dalam mencetak pendapatan sendiri, terbatasnya kesempatan menikmati pendidikan dan pekerjaan yang layak di sektor formal.

Dari anggapan dasar tersebut dapat kita ambil konsep-konsep dasar yang perlu dibangun, yaitu :

- a) Pembangunan hendaknya lebih diarahkan pada daerah-daerah pedesaan yang identik dengan penduduk miskin, dengan meningkatkan potensi yang dimiliki daerah pedesaan yang bersangkutan.
- b) Kaum wanita dan anak-anak harus diberi kesempatan berusaha secara mandiri agar dapat berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan.

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPD)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

1. Prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif
- b. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- c. **Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- d. **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- e. **Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. **Prioritas Usulan.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas

- g. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

2. Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Perdesaan

Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD)

menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri Perdesaan dinikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri Perdesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek), PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP), dan lain-lain.

Pada 2010, berdasarkan ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri.

3. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

- b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
- c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan

dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

d. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan.

Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan

mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi UPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat.

f. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, UPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana UPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

4. Penyaluran Dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan

penelusuran. Warga desa, dalam hal ini staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ trust funds tersebut merupakan

wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

5. Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

a. Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru.

62,5 juta Hari Orang Kerja (HOK) dihimpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat perdesaan dengan imbalan sesuai dengan harga setempat.

Dibukanya usaha dan jasa transportasi oleh masyarakat maupun pihak lain menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru yang dikerjakan masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil/ rumah tangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga perdesaan. Hasil studi di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibanding kecamatan non-program. Selanjutnya, semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga perdesaan.

c. Sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan. Berdasarkan berbagai studi dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Perdesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin. Selain itu, PNPM Mandiri Perdesaan juga dinilai sukses memberdayakan kaum perempuan.

d. Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan. Pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif. Masyarakat Indonesia di lebih dari 34.100 desa telah turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing. Sekitar 62% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di desanya, dan sekitar 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/ prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin. Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terus meningkat, berkisar antara 31-46%. Rata – rata swadaya masyarakat secara keseluruhan adalah 17% dan bervariasi di tiap provinsi. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK kini menyatakan telah memiliki kemampuan

berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanaan PPK. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PPK memiliki kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang. Tingginya komitmen pemerintah dan kontribusi mencapai 40% dari kabupaten-kabupaten pada PPK II, PPK III, serta PNPM-PPK yang menyediakan dana bersama (matching grants) dan cost sharing untuk pelaksanaan program. Semua kabupaten di PPK III dan PNPM-PPK menyediakan dana dari anggaran daerah untuk pelaksanaan program. Akuntabilitas pemerintah dan peranan masyarakat madani lebih kuat. LSM dan jurnalis di provinsi PPK bertindak sebagai pengawas untuk memantau pelaksanaan PPK secara independen. Program telah membangun mekanisme yang memungkinkan ketegangan yang diredakan. Hal ini terbukti dari keberhasilan pelaksanaan program di lokasi konflik dan bencana.

e. Rendahnya tingkat korupsi, Audit independen terhadap PPK yang dilaksanakan oleh Moores Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah disalurkan. Pada kenyataannya, sejak digulirkan pada 1998 hingga saat ini, penyimpangan dana dalam program yang menjunjung semangat transparansi dan akuntabilitas ini sangat rendah, hanya sekitar 0,18% dari total dana yang telah disalurkan.

- f. Meningkatkan akses ke pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih di lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Perdesaan (melalui PPK dan PNPM-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana/prasarana perdesaan di lokasi program di seluruh Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Awan Santosa, dkk. (2003) menganalisis tentang tiga program pemerintah, yaitu IDT, PPK dan P2KP dalam tulisannya berjudul "Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi D.I. Jogjakarta" yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 18 no. 2, 2003. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program IDT paling berhasil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi peserta program. Hal ini dikarenakan keberhasilan mereka dalam usaha (*net income* naik) serta ketepatan sasaran program IDT yang lebih ditujukan pada penduduk yang benar-benar miskin.

Sedangkan untuk program P2KP, justru ada penurunan tingkat pendapatan masyarakat setelah menjadi peserta program. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan yang hilang (pensiun), peralihan usaha yang menghasilkan pendapatan lebih rendah, serta sasaran program yang ternyata tidak hanya ditujukan untuk penduduk miskin.

Putut Indriyono dan Eddy Junarsin (2002) meneliti tentang kemiskinan di desa Sriharjo sebuah desa di Kecamatan Imogiri

Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pola yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan di desa Sriharjo adalah melalui kebijakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, bangunan sekolah, Puskesmas, fasilitas listrik, dan infrastruktur-infrastruktur penunjang yang lain. Melalui kebijakan seperti itu keterisolasian Sriharjo dapat dihilangkan, sistem ekonomi pasar dapat dikembangkan lebih lancar dan efisien, mobilitas penduduk ke kota dan sebaliknya dapat ditingkatkan yang pada akhirnya mampu menyejahterakan penduduk desa.

David Bigman et. al. (2000) dalam tulisannya ” Community Targeting for Poverty Reduction in Burkina Faso”. Penelitian ini melihat pola pengelompokan penduduk miskin dengan menggunakan pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemetaan kemiskinan bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan atau daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi. Informasi tersebut diperlukan agar penyaluran program-program anti kemiskinan bisa tepat sasaran untuk kelompok miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Heni Wahyuni (2004), tulisannya berjudul ”Inequality of Distribution and Poverty Incidence in the Adjustment Period and Analysis of Economic Crisis Impact in Indonesia”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel sosial ekonomi yaitu pengeluaran per kapita, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, kepadatan penduduk,

pendapatan per kapita, dan variabel yang menunjukkan krisis ekonomi signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pemerintah seharusnya difokuskan kepada variabel kebijakan yang signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Sebagai contoh, untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di perkotaan, kebijakan yang bisa pemerintah lakukan adalah dengan membangun prasarana yang memadai di pedesaan serta mengupayakan pemerataan pembangunan di pedesaan. Dengan demikian ketimpangan pendapatan bisa ditekan dan taraf hidup masyarakat di pedesaan akan menjadi lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Lukman Hakim (2007) menganalisis pandangan para pembuat kebijakan terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil dari studi ini antara lain: pertama, sebagian besar pembuat kebijakan menganggap bahwa pemerintah tetap paling bertanggungjawab terhadap penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. Kedua, sasaran usia penerima manfaat program kemiskinan sebaiknya difokuskan kepada usia 15-55 tahun, dibandingkan usia <15 dan >55 tahun. Ketiga, lembaga apa yang sebaiknya mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan, sebagian besar responden mengusulkan komite khusus semacam Komite

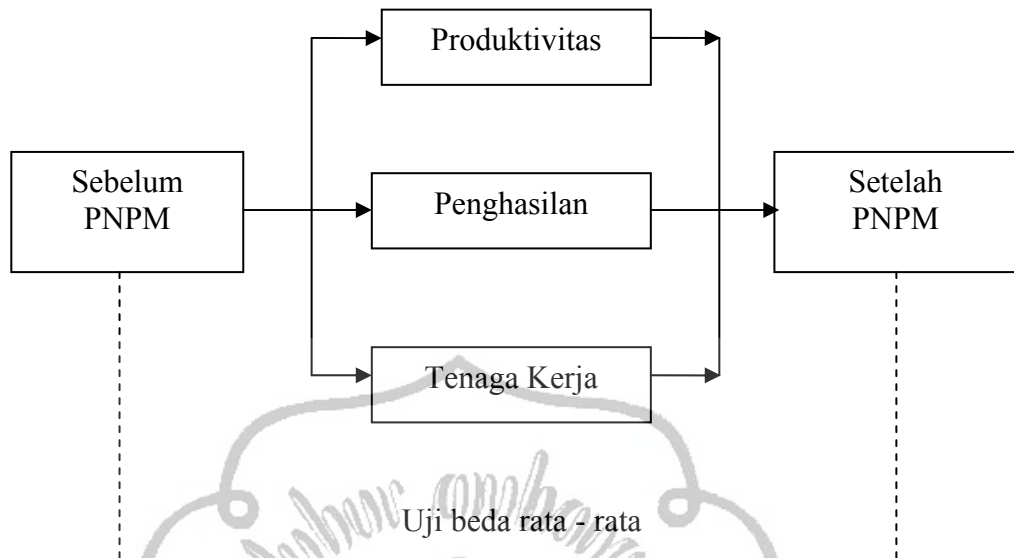
Penanggulangan Kemiskinan (KPK), daripada BAPPEDA maupun antar instansi melakukannya sendiri. Keempat, fokus penanggulangan kemiskinan hendaknya pada pembangunan prasarana fisik dibandingkan kesehatan dan pendidikan. Kelima, sebaiknya program penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada masalah permodalan, dibandingkan pelatihan dan pendampingan.

Tri Joko (2004), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta menganalisis keberhasilan program pengembangan kecamatan fase II di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPK fase II.

Disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa pelaksanaan PPK fase II masih terdapat kekurangan, dan penelitiannya belum cukup memberikan informasi mengenai dampak riil pelaksanaan PPK fase II terhadap penduduk miskin yang menjadi peserta program. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai perkembangan PPK, yang saat ini telah berubah nama menjadi PNPM-PPK.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan Gambar 2.1. Pada Gambar 2.1 memperlihatkan (1) perbedaan rata – rata tingkat produktivitas sebelum dan setelah adanya PNPM, (2) perbedaan rata – rata jumlah sebelum dan tenaga kerja setelah adanya PNPM, (3) perbedaan rata – rata penghasilan sebelum dan setelah adanya PNPM.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

1. Diduga program PNPM meningkatkan jumlah produksi anggota SPP
2. Diduga program PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja
3. Diduga program PNPM meningkatkan penghasilan anggota SPP

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Dan Sumber Data

Data diperoleh dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer/lapangan diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan angket/kuisisioner dan observasi, sedangkan data sekunder didapat dari laporan tertulis dari UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Kec Ngargoyoso, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KB PMD) Kabupaten Karanganyar serta buku-buku yang menunjang.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah 82 kelompok dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 410 orang. Tiap-tiap kelompok dapat bantuan kredit dari Rp.2.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 40 dari populasi 410 anggota kelompok. Alasan pengambilan sampel ini karena populasi dalam penelitian ini diasumsikan homogen, sehingga jumlah sampel tersebut dinilai telah mewakili terhadap jumlah populasi penelitian (Singarimbun dkk, 1995).

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan undian untuk menentukannya.

C. Analisis Data

Uji beda Mean jumlah produksi, tenaga kerja dan penghasilan.

Uji beda mean digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah produksi, tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota kelompok sebelum dan sesudah menerima dana kredit dari program PNPM Mandiri Perdesaan.

Statistik uji yang digunakan adalah uji Z dengan prosedur sebagai berikut :

$$Z_{hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan :

- \bar{x}_1 = rata-rata jumlah produksi, tenaga kerja dan penghasilan setelah mendapat pelaksanaan program
- \bar{x}_2 = rata-rata jumlah produksi, tenaga kerja dan penghasilan sebelum pelaksanaan program
- n_1 = banyaknya sampel kelompok setelah
- n_2 = banyaknya sampel kelompok sebelum
- s = standart devias

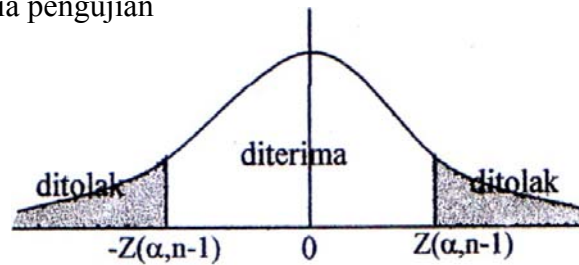
Prosedur

a.a. Hipotesis

- $H_0 : b_1 = 0$: diduga penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM Mandiri Perdesaan adalah sama
- $H_1 : b_1 \neq 0$: diduga penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM Mandiri Perdesaan adalah tidak sama

b.b. Tingkat signifikansi : $\alpha = 0,05$

c.c. Kriteria pengujian



Hasil perhitungan Z_{hitung} dibandingkan dengan Z_{tabel} pada taraf signifikansi 10%

d.d. Kriteria rumus :

$$Z_{hitung} = \frac{x_1 - x_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

e.e. Kesimpulan : H_0 diterima jika $Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$

D. ASUMSI PENELITIAN

Asumsi penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1). Jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi desa dan sumber daya manusia yang ada. Jalan pikiran terhadap asumsi ini bahwa usaha produktif yang dilakukan anggota tidak dipengaruhi oleh potensi yang ada.
- 2). Hanya besar uang tunai yang berasal dari dana PNPM- MPd yang digunakan sedangkan uang tunai yang berasal dari sumber lain adalah konstan. Dari asumsi ini dapat dijelaskan bahwa uang tunai yang diterima dan digunakan anggota dapat dipengaruhi oleh pinjaman-pinjaman di luar

dana PNPM-MPd seperti dana subsidi seperti dana subsidi BBM, dana bantuan LSM.

- 3). Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan uang tunai PNPM – MPd dan digunakan secara optimal artinya setiap anggota yang menerima bantuan uang tunai memiliki kesempatan untuk mengelola dana tersebut secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan kembali sebagai modal bergulir dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
- 4). Variabel partisipasi anggota yang mempengaruhi kemampuan pengembangan dana PNPM-MPd sebagai dana bergulir dianggap tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar anggota kelompok masyarakat. Keadaan anggota kelompok masyarakat dari aspek potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, lingkungan fisik dan sosial budaya dianggap sama.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. PNPM – MPd

Dana yang dimaksud disini adalah dana berupa kredit/pinjaman yang berasal dari PNPM–MPd yang dimaksud untuk modal usaha, yang diberi nama program simpan pinjam perempuan (SPP). Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan usaha karena tanpa modal usaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usaha. Pengukuran dengan satu rupiah.

2. Produksi

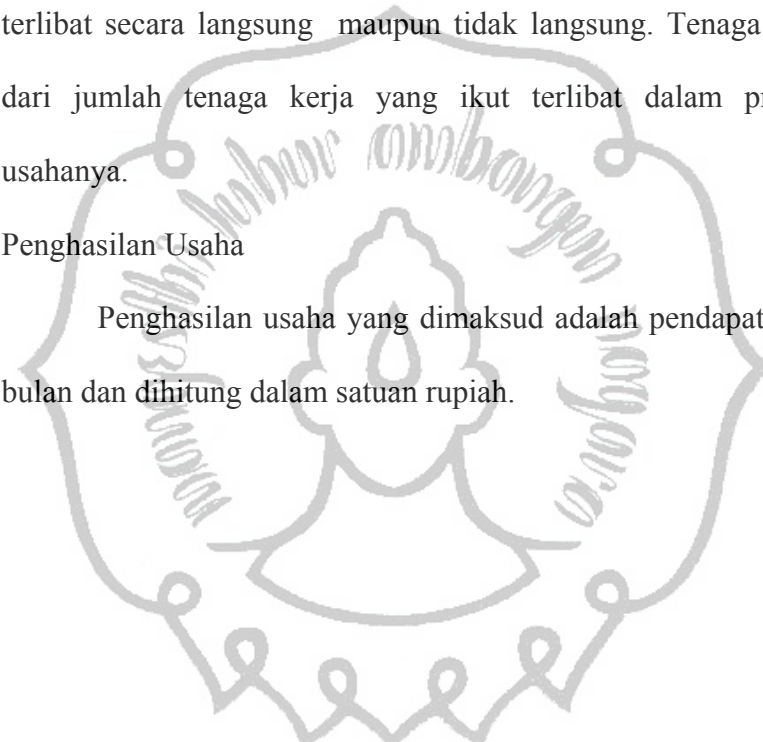
Produksi yang dimaksud adalah banyaknya hasil produksi usaha yang dilakukan. Satuan yang digunakan adalah prosentase (%) karena tiap jenis usaha memiliki hasil yang berbeda.

3. Tenaga kerja

Dalam menjalankan usaha membutuhkan tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses kegiatan usahanya.

4. Penghasilan Usaha

Penghasilan usaha yang dimaksud adalah pendapatan selama satu bulan dan dihitung dalam satuan rupiah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Karanganyar

1. Kondisi Geografis

a. Letak Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri
- Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara $110^{\circ} 40''$ - $110^{\circ} 70''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 46''$ - $7^{\circ} 46''$ Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan air laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22° – 31° C.

b. Curah Hujan

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2002 adalah 84 hari dengan rata-rata curah hujan 1.151 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret dan terendah pada Bulan Juni.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,6374 Ha, yang terdiri dari luas tanah 22.852,9496 Ha dan luas tanah kering 54.495,6878 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 7.891,9341 Ha, ½ teknis 6.149,6653 Ha, sederhana 7.142,3593 Ha dan tadah hujan 1.698,9341 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 20.531,2973 Ha dan luas tanah untuk tegalan/kebun 17.945,4868Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan negara seluas 9.729,4995 Ha dan perkebunan seluas 3.251,5006 Ha

2. Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 177 desa/kelurahan (15 kelurahan). Desa/kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.1835 RW dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan terdiri dari swadaya 12 desa/kelurahan, swakarya 140 desa/kelurahan dan swasembada 25 desa/kelurahan.

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi tahun 2008 sebanyak 865.580 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 429.852 jiwa dan perempuan 435.728 jiwa. Dibandingkan tahun 2007, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 14.214 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,67%. 69 Kecamatan dengan

penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 75.796 jiwa (8,76%), Kecamatan Jaten 10.770 jiwa (8,18%), dan Kecamatan Gondang 68.571 jiwa (7,92%).

Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 27.656 jiwa (3,20%), Kecamatan Nargoyoso 35.351 jiwa (4,08%), dan Kecamatan Kerjo 37.380 jiwa (4,32%). Seiring dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk Kabupaten Karanganyar mencapai 1.119 jiwa/Km². Disisi lain persebaran penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Colomadu, yaitu 3.889 jiwa/Km², dan yang paling rendah adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 492 jiwa/Km².

Tabel 4.1. Kecamatan, Luas Wilayahnya, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
			Laki ²	Permp.	Jumlah	
1	Jatipuro	40,36	18.983	18.931	37.884	924
2	Jatiyoso	67,16	20.366	19.952	40.318	588
3	Jumapolo	55,67	23.471	23.507	46.978	823
4	Jumantono	53,55	23.910	24.514	48.424	879
5	Matesih	26,27	22.729	22.967	46.696	1.674
6	Tawangmangu	70,03	22.155	22.777	44.892	626
7	Ngargoyoso	65,34	17.470	17.712	35.182	514
8	Karangpandan	34,11	20.956	21.797	42.753	1.191
9	Karanganyar	43,03	35.767	37.932	73.699	1.642
10	Tasikmadu	27,60	27.532	27.847	55.379	1.930
11	Jaten	25,55	34.129	35.072	69.201	2.597
12	Colomadu	15,64	28.344	28.740	57.084	3.301
13	Gondangrejo	56,80	32.884	33.349	66.233	1.093
14	Kebakkramat	36,46	29.067	29.469	58.536	1.527
15	Mojogedang	53,31	32.196	33.276	64.472	1.139
16	Kerjo	46,82	18.103	18.960	37.063	777
17	Jenawi	56,08	13.725	13.847	27.572	475
	Jumlah	773,78	421.717	429.649	851.366	1.053

Sumber : Karanganyar dalam angka, BPS Karanganyar 2008

b. Tenaga Kerja

Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, maka sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani), yaitu sebanyak 222.794 orang (30,83%), pekerja sebagai buruh industri sebanyak 104.204 orang (14,65%), buruh bangunan 49.099 orang (6,90%) dan pedagang sebanyak 44.762 orang (6,19%). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, sektor pengangkutan, PNS/POLRI, pensiunan, jasa-jasa, dan lain-lain. 70 Menurut data Dinas Kependudukan, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi (KTT) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 12.245 orang. Dibandingkan dengan tahun 2007, maka mengalami peningkatan pencari kerja hampir di semua jenjang pendidikan. Pencari kerja lulusan SLTA tercatat yang paling besar yaitu 5.689 orang (46,46%), dan yang paling sedikit adalah lulusan SD, yaitu 130 orang (1,06%). Pencari kerja yang sudah ditempatkan pada tahun 2008 sebanyak 1.382 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan..

4. Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 jumlah SD N sebanyak 483 buah, SD Swasta 15 buah, SLTP N 50 buah, SLTP Swasta 26 buah, SMU N 12 buah, SMU Swasta 6 buah, SMK N 3 buah, dan SMK Swasta 25 buah. Data dari kantor Depag Kabupaten Karanganyar jumlah sekolah MI sebanyak 60 buah, MTs 23 buah dan MA 4 buah. Jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 12 buah. Jumlah murid SD/MI sebanyak 81.458 siswa, dengan guru sebanyak 4.857 orang. Jumlah murid SLTP/MTs sebanyak 37.130 siswa dengan guru sebanyak 2.751 orang. Jumlah murid SMU/MA.

b. Kesehatan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2008 jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari 4 rumah sakit, 59 Puskesmas Pembantu, dan 34 Balai Pengobatan Swasta. Tenaga kesehatan (tidak termasuk yang di RS) yang tersedia terdiri dari dokter spesialis 58 orang, dokter umum 84 orang, dokter gigi 32 orang, bidan 255 orang, dan perawat kesehatan 384 orang.

c. Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang erat. Di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 terdapat tempat ibadah yaitu masjid 1.821 buah, mushola 679 buah, gereja 127 buah, pura 12 buah dan vihara 1 buah.

5. Pertanian

a. Tanaman Bahan Makanan

Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor dimana produk dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agro industri

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008 diperoleh produksi padi sawah sebanyak 209.321 ton, jagung sebanyak 21.915 ton, ubi kayu sebanyak 107.68 ton dan kacang tanah sebanyak 5.890 ton. Sebagian tanah di Kabupaten Karanganyar merupakan tanah pegunungan atau perbukitan (Jatiyoso, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso dan Jenawi) yang sangat potensial untuk tanaman sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, kobis, sawi, cabe, tomat, buncis dan sebagainya.

b. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Karanganyar yang sangat potensial adalah cengkeh yang mencapai luas sebesar 2.340,31 Ha dan selama tahun 2008 produksinya mencapai 320.245 ton. Tanaman lain yang juga potensial untuk dikembangkan adalah kelapa, mete, tebu dan jahe. Sementara itu untuk tanaman perkebunan besar yang potensial adalah teh dan karet.

c. Peternakan

Populasi ternak yang banyak diusahakan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah sapi 46.589 ekor, sapi perah 287 ekor, kerbau 1.388 ekor, kuda 353 ekor, kambing 20.225 ekor, domba 114.653 ekor, babi 53.912 ekor, ayam ras 1.114.097 ekor, ayam buras 893.148 ekor, ayam pedaging 1.874.000 ekor, itik 69.608 ekor, kelinci 10.703 ekor dan burung puyuh 229.730 ekor.

Selama tahun 2008 hasil-hasil produksi ternak terdiri dari telur ayam buras 1.148.177 kg, telur ayam ras 12.457.840 kg, telur itik 446.278 kg, telur puyuh 435.664 kh, daging 1.542.624 kh dan susu 428.130 liter.

d. Perikanan

Selama tahun 2008 produksi ikan mencapai 825.868 kg, yang berasal dari cek dam 38.044 kg, kolam air tenang 541.324 kg, sungai 220.872 kg dan waduk 25.628 kg. Sementara itu telah dilakukan penebaran benih di berbagai karper 433.000 ekor, tawes 1.956.000 ekor, nila merah 3.563.000 ekor, nila gif 396.000 ekor, gurameh 34.000 ekor dan lele 571.500 ekor.

6. Industri dan Perdagangan

a. Industri

Pada tahun 2008 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja > 100 orang) sebanyak 103 unit dan industri sedang (tenaga kerja 21 – 99 orang) sebanyak 94 unit.

Dari 197 industri besar dan sedang tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 70.676 orang. Industri besar/sedang yang paling banyak adalah di sektor tekstil, yaitu 81 unit (41,59 %), industri makanan/bahan makanan 51 unit (21,09 %) dan industri kimia 23 unit (15,66 %).

Karena masih lesunya perekonomian maupun politik yang belum mapan di negara Indonesia ini, menyebabkan sektor industri dan

perdagangan masih sulit untuk berkembang. Bahkan jumlah perusahaan maupun tenaga kerja menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Penanaman Modal (Pendal) dan Koperasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 banyaknya industri formal sebanyak 603 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 37.332 orang. Sedangkan industri non formal (sentra industri dan non sentra industri) sebanyak 12.550 usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 32.113 orang.

Selama tahun 2008 terdapat industri kecil baru sebanyak 16 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 222 orang, serta menyerap investasi sebesar Rp. 670,824 juta.

b. Perdagangan dan Koperasi

Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 terdapat pasar 69 buah; toko/kios/warung 9.016 buah; KUD 17 buah dan koperasi simpan pinjam 424 buah. Dibandingkan tahun 2001, khususnya toko/kios/warung dan koperasi simpan pinjam, jumlahnya mengalami kenaikan.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya semakin besar. Pada tahun 2008 di Kabupaten Karanganyar terdapat koperasi sebanyak 616 buah dengan jumlah anggota mencapai 109.176

orang. Jenis koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT dan KSU) yaitu 431 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 72 buah dan koperasi karyawan 3 buah.

7. Perhubungan

Berdasarkan data dari Dinas PU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar, panjang jalan meliputi jalan negara 1,90 km, jalan propinsi 95,03 km dan jalan kabupaten 764, 33 km. Jenis permukaan untuk jalan kabupaten terdiri dari permukaan aspal 737,15 km, kerikil 19,40 km dan tanah 7,78 km. Sedangkan kondisinya adalah baik 549,27 km, sedang 176,33 km dan rusak 38,73 km.

8. Pertumbuhan APBD, PDRB, Inflasi.

a. Pertumbuhan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Dari sisi lain, APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk dapat melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Karanganyar sebelum era otonomi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 36,89%. Sedangkan pada era selama otonomi daerah, pertumbuhan rata-rata

APBD sebesar 31,10%, atau mengalami penurunan sekitar 5,79% dari era sebelum otonomi daerah.

b. PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar bila dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama tahun anggaran 2001-2008 dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2. PDRB Kabupaten Karanganyar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2001 – 2008.

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
	Laju Pertmb. (%)	Laju Pertmb. (%)
2001	10,64	1,42
2002	12,41	3,19
2003	11,15	3,32
2004	11,86	4,03
2005	11,37	5,49
2006	10,93	5,08
2007	10,93	5,74
2008	11,21	5,43
Rerata**	11,31	4,21

Sumber : DIPENDA dan BPS Karanganyar 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada era sebelum otonomi daerah yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 18,8%, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar -1,41%. Pertumbuhan ekonomi pada era selama otonomi daerah menurut PDRB ADHB sebesar 11,31%, sedangkan menurut PDRB ADHK sebesar 4,21%. Dari angka tersebut, pertumbuhan 75 ekonomi Kabupaten Karanganyar

menurut PDRB atas dasar harga berlaku lebih besar dari pada menurut PDRB harga konstan. Penyumbang penerimaan daerah terbesar dari tahun ke tahun adalah sektor industri pengolahan.

c. Inflasi

Selama tahun 2008, inflasi di Kabupaten Karanganyar mencapai 10,83%. Inflasi tertinggi jatuh pada bulan Juni yaitu sebesar 2,34% dan terendah pada bulan Desember sebesar 0,54%. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan mencapai 20,17%, kelompok kesehatan sebesar 13,55%, serta kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 9,28%. Penyumbang inflasi terendah adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yaitu sebesar 2,49% serta kelompok sandang sebesar 3,23%.

B. Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini, data demografi sampel yang diukur adalah asal desa kelompok, jenis kelamin, usia, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan besarnya dana yang diterima. Data – data tersebut diharapkan dapat menjadi informasi mengenai karakteristik anggota kelompok pemanfaat SPP yang menerima PNPM – MPd di Kabupaten Karanganyar. Selain data demografi, data yang didapat pada penelitian antara lain jumlah tenaga kerja, produktifitas dan penghasilan tiap bulan sebelum dan sesudah adanya PNPM.

1. Asal Desa Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 82 kelompok terdistribusi pada 5 (empat desa), yaitu Berjo (4 kelompok), Kemuning (2 kelompok), Ngargoyoso (3 kelompok), Nglegok (3 kelompok), Girimulyo (4 kelompok). Tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi asal desa kelompok yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.3

Distribusi frekuensi asal desa kelompok sampel

Desa	Frekuensi	Prosentase (%)
Berjo	7	17,50
Ngargoyoso	8	20,00
Kemuning	9	22,50
Girimulyo	8	20,00
Nglegok	8	20,00
Total	40	100,00

Sumber : data primer diolah

2. Jenis Kelamin

Dari hasil pengumpulan kuesioner sebanyak 40 orang, distribusi frekuensi responden ditunjukkan pada Table 4.4. Berdasarkan Tabel 4.4 seluruh responden adalah perempuan.

Tabel 4.4

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
Laki – Laki	0	0,00
Perempuan	40	100,00
Total	40	100,00

Sumber : data primer diolah

3. Umur

Distribusi responden menurut umur dibagi dalam klasifikasi dengan range 5 (lima) seperti ditunjukkan Tabel 4.5 dengan rata – rata umur responden adalah 38 tahun.

Tabel 4.5

Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur

Umur	Frekuensi	Prosentase (%)
25 - 29 Tahun	1	2,50
30 - 34 Tahun	3	7,50
35 - 39 Tahun	11	27,50
40 - 44 Tahun	17	42,50
>= 45 Tahun	8	20,00
Total	40	100,00

Sumber : data primer diolah

4. Jumlah Tanggungan

Distribusi responden menurut jumlah tanggungan keluarga ditunjukkan Tabel 4.6, dengan rata - rata tanggungan 3,3.

Tabel 4.6

Distribusi frekuensi jumlah tanggungan keluarga

Jumlah	Frekuensi	Prosentase (%)
1 orang	8	20,00
2 orang	11	27,50
3 orang	12	30,00
4 orang	8	20,00
5 orang	1	2,50
Total	40	100,00

5. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, Tabel 4.7 menunjukkan distribusi frekuensi tingkat pendidikan dari responden.

Tabel 4.7

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Tingkat	Frekuensi	Prosentase (%)
SD	8	20,00
SLTP	18	45,00
SLTA	10	25,00
Universitas	4	10,00
Total	40	100,00

Sumber : data diolah

6. Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh anggota kelompok penerima dana PNPM ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Prosentase (%)
Jasa	0	0,00
Perdagangan	10	25,00
Peternakan/Budidaya	13	32,50
Home Industri	17	42,50
Total	40	100,00

Sumber : data diolah

C. Analisis Data

Untuk Mengetahui dampak dari adanya program PNPM terhadap produktivitas, tenaga kerja dan penghasilan usaha digunakan uji beda rata – rata. Hasil uji beda antara sebelum dan setelah adanya PNPM ditunjukkan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil uji beda rata - rata

Variabel	Rata - Rata		Selisih	Uji beda sebelum dengan setelah adanya PNPM		Kesimpulan
	Sebelum	Sesudah		Z _{hitung}	Signifikansi	
Produksi	480,75	844,74	364,00	7,936	0,000	Signifikan
Tenaga Kerja	0,53	1,25	0,725	7,660	0,000	Signifikan
Penghasilan	1909075.00	3515250.00	1606175	5,159	0,000	Signifikan

Z_{tabel} (2,021) , α : 5%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji beda rata – rata yang ditunjukkan table 4.9 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ada peningkatan jumlah produksi pada usaha anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan jumlah produksi setelah lebih besar dibanding sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z_{hitung} (7,936) > Z_{tabel}

(2,021) atau nilai Signifikansinya (0,000) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%.

2. Ada peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan jumlah tenaga kerja setelah lebih besar dibanding sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z_{hitung} (7,660) > Z_{tabel} (2,021) atau nilai Signifikansinya (0,000) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%.
3. Ada peningkatan penghasilan per bulan usaha pada usaha anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan penghasilan per bulan usaha setelah lebih besar dibanding sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z_{hitung} (5,159) > Z_{tabel} (2,021) atau nilai Signifikansinya (0,000) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%

D. Pembahasan

1. Hasil temuan pertama

Berdasarkan uji beda rata - rata antara sebelum dengan setelah adanya PNPM pada anggota kelompok SPP (Simpan pinjam perempuan) yang memanfaatkan dana PNPM didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Terdapat peningkatan jumlah produksi yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM. Dengan prosentase kenaikan jumlah produksi sebesar 75,71% setelah adanya PNPM.

Hasil uji hipotesis didapatkan nilai $Z_{hitung} (7,936) > Z_{tabel} (2,021)$ atau nilai Signifikansinya $(0,000) < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tanda yang positif, menunjukkan bahwa jumlah produksi setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan jumlah produksi sebelum mendapatkan dana PNPM. Dengan demikian hipotesis 1 terbukti.

- b. Terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM. Dengan prosentasi kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 0,725 (136,8%) setelah adanya PNPM. Hasil uji hipotesis didapatkan nilai $Z_{hitung} (7,660) > Z_{tabel} (2,021)$ atau nilai Signifikansinya $(0,000) < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tanda yang positif, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan produktivitas sebelum mendapatkan dana PNPM. Dengan demikian hipotesis 2 terbukti.
- c. Terdapat peningkatan penghasilan perbulan yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM. Dengan prosentasi kenaikan produksi sebesar 84,13% setelah adanya PNPM. Hasil uji hipotesis didapatkan nilai $Z_{hitung} (5,159) > Z_{tabel} (2,021)$ atau nilai Signifikansinya $(0,000) < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tanda yang positif, menunjukkan bahwa penghasilan perbulan setelah mendapatkan dana PNPM lebih

banyak dibandingkan produktivitas sebelum mendapatkan dana PNPM. Dengan demikian hipotesis 3 terbukti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dampak Program PNPM
 - a. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah produksi usaha anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 75,71%.
 - b. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 136,8%.
 - c. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan penghasilan usaha anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 84,13%.
 - d. Adanya pinjaman dana PNPM yang meningkatkan jumlah produksi, jumlah tenaga kerja dan penghasilan usaha anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), berarti juga meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP).

B. Saran

1. Saran Manajerial

Dampak yang positif adanya PNPM di kecamatan Ngargoyoso kabupaten Karanganyar, menunjukkan program ini cukup berhasil dalam hal :

- a. Meningkatkan pendapatan anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja.
- c. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapinya administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Untuk itu hendaknya pengelola program PNPM dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memberikan lagi kepada anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang dianggap dapat menjalankan modal yang dipinjam untuk mengembangkan usahanya.
- b. Menambah jumlah modal pinjaman untuk tahun – tahun kedepan.

- c. Memberikan pengetahuan tentang dunia wirausaha, agar semakin banyak anggota kelompok yang melakukan wirausaha.
- d. Mengontrol kinerja anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), agar dapat lebih meningkatkan produktivitas dan penambahan jumlah tenaga kerja baru.

Untuk anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) penerima dana PNPM dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Mau membuka wawasan tentang dunia wirausaha.
- b. Memperbaiki kinerja dan mengembangkan usahanya karena kegiatan yang mereka lakukan selama ini bersifat tradisional mengikuti jejak pendahulunya.
- c. Berusaha memotivasi diri bahwa dengan bekerja keras dirinya mampu mengentaskan kemiskinan untuk hidup mandiri.

2. Saran Penelitian Kedepan

Untuk peneliti kedepan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembang kan penelitian antara lain :

- a. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerima dana PNPM adalah perempuan. Penelitian kedepan hendaknya perlu memfokuskan pada peran perempuan dalam memanfaatkan dana PNPM.
- b. Beberapa variabel dalam penelitian ini belum dilakukan uji statistic yang lebih mendalam seperti faktor – faktor demografi. Penelitian kedepan dapat memasukan faktor – faktor demografi sebagai

variabel independen seperti umur dan pendidikan, hal ini berkaitan dengan masa produktivitas dan kemampuan memutuskan permasalahan dalam berwirausaha.

